

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Jangan Buru-Buru Nyinyir, Tunggu Penjelasan Anies

JAKARTA—Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta publik tidak buru-buru “nyinyir” reklamasi di kawasan Ancol. Proyek reklamasi tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Riano di Jakarta, Kamis (2/7/2020), mengatakan lebih bijak ditunggu penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang konsep penataan dan pengelolaan pengembangan kawasan Ancol. Kepgub itu memberi izin pada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan reklamasi guna perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi seluas 155 hektare (ha).

“Kita lihat dulu nanti apa alasan penerbitan izin itu dan bagaimana perluasan kawasan itu akan dibangun,” kata Riano. “Saya masih menunggu penjelasan Anies soal rencana penataan tata ruang dan tata wilayah di atas lahan yang dimaksud,” katanya.

Menurut dia, izin penerbitan perluasan dan pemanfaatan pulau kawasan yang sudah jadi daratan tidak sama dengan membangun pulau baru reklamasi. Menurut Riano, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan atau pulau baru di atas perairan. Sedangkan untuk pulau yang sudah terbangun atau perluasan, Pemprov DKI harus mengatur pemanfaatannya dengan memastikan semua aturan yang terkait dipatuhi.

“Hasil reklamasi di masa lalu faktanya sudah jadi daratan, sekarang yang terpenting harus difokuskan untuk kepentingan publik. Jadi, pemanfaatan atau perluasan itu beda dengan melanjutkan reklamasi,” tutur Riano. Anggota Komisi-D DPRD DKI ini menegaskan, dewan siap mengawasi dan memastikan proses pelaksanaan perluasan kawasan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, Riano juga mengingatkan Pemda DKI agar hasil perluasan kawasan rekreasi

itu nantinya juga bisa diakses publik secara gratis sebagaimana janji Anies.

Riano juga mewanti-wanti pihak pengelola agar memastikan pembangunan kawasan seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare itu menaati UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Di lain sisi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Si-manjuntak mengkritik sikap Gubernur Anies Baswedan soal penerbitan izin reklamasi di kawasan Ancol. Menurutnya, kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert, di Jakarta, Kamis (2/7/2020). Gilbert menyinggung soal janji kampanye Anies pada Pilkada 2017 lalu. Saat itu, janji politik Anies menolak reklamasi pantai utara Jakarta.

Gilbert juga menyoroti bagaimana sikap Anies yang menolak reklamasi meski berkali-kali dilobi pengembang. Bahkan, ia menyoroti pertemuan Anies dengan para pengembang pulau reklamasi di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2017 silam.

“Di situ dia dipertemukan dengan para pengusaha reklamasi, dan tegas mengatakan tidak. Reklamasi masa lampau, sekarang kesan reklamasi masa depan. Kita bingung, Anies

hidup di masa yang mana,” tuturnya.

Gilbert menilai kini omongan Anies soal reklamasi jadi sulit dipegang. Pasalnya, antara omongannya saat menolak reklamasi dengan keluarnya izin reklamasi Ancol dan Dufan jadi bertolak belakang.

Selain itu, Gilbert mengatakan Anies juga tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD sebelum menerbitkan izin reklamasi di Ancol. “Tidak pernah mengungkapkan ke komisi B soal rencana perluasan (Ancol dan Dufan). Ada apa kok mesti ditutup-tutupin,” kata Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD lainnya Eneng Malianasari, yang juga melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies sebelumnya. Jelas tidak sesuai dengan kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. “Ada janji kampanye dari gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili, panggilan akrab Eneng Malianasari. (ant)